

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Badan Pusat Statistik. *Batam dalam angka 2006*. Batam: Badan Pusat Statistik, 2006

Batam Pos Online. *Pengurusan Sertifikat Tanah*. 09 September 2006. url: <http://batampos.co.id>

Hardianto, BJS. Batam, *Dua Nakhoda Dua Mesin*. Kompas. 04 Agustus 2005

Hermit, Herman. *Cara memperoleh sertifikat tanah hak milik, tanah negara dan tanah pmda: teori dan praktek pendaftaran tanah di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2004

Hidayati, Wahyu dan Harjanto, Budi. *Konsep dasar penilaian properti*. Edisi 1. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM, 2003.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Seri hukum harta kekayaan hak-hak atas tanah*. Jakarta: Kencana, 2004

Parlindungan, A.P., *Beberapa pelaksanaan kegiatan dari UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1992

_____, *Hak pengelolaan menurut sistem UUPA*. Bandung: Mandar Maju, 1989.

_____, *Pendaftaran dan konversi hak-hak atas tanah menurut UUPA*. Bandung: Alumni, 1988

Perangin, Effendi. *Praktek jual beli tanah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1994

Santoso, Ferry. Batam, *Zona real estate khusus*. Kompas. 18 Mei 2006

Siahaan, M.P. *Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan: teori dan praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.

Situmeang, Ampuan. *Diskusi Panel : hak pengelolaan lahan di pulau batam dalam kewenangan pemerintah kota batam di bidang pertanahan*, 2002.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijakan pertanahan: antara regulasi dan implementasi*. Jakarta: Buku Kompas, 2005.

Zein Ramli. Makalah : *otonomi daerah dan hak pengelolaan*, 2002.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (Bonded Zone)

Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974 tentang Penunjukan dan Penetapan Beberapa Wilayah Usaha Bonded Warehouse di Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 tahun 1977 tentang Tata cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftaran

Peraturan Menteri Agraria/KBPN Nomor 03 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 09 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam

Keputusan Walikota Batam Nomor KPTS.105/HK/III/2004 tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di kota Batam

Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 033/UM-KPTS/III/66 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Bagian-bagian Areal Tanah di Pulau Batam

Keputusan Ketua Otorita Batam Nomor 104/UM-KPTS/IX/86 tentang Penentuan Tarif Baru Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO)

Surat BPN Pusat Nomor 410-15/8 Januari 2002 tentang Pemberian Wewenang kepada Pemerintah Kota Batam untuk Izin Lokasi

Lain-lain

Kamus Hukum : Yogyakarta : Ghalia Indonesia : 1996

Kamus Terminologi Hukum Inggris-Indonesia : Ranuhandoko, Sinar Grafika : 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Inggris-Indonesia, Jakarta : Shadily Hasan dan Echols John M. : PT. Gramedia

Kamus Indonesia-Inggris, Jakarta : Shadily Hasan dan Echols John M. : PT. Gramedia



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Hak pengelolaan lahan dan investasi properti di Pulau Batam
TOBING, Joice Ivonne L, Prof.Dr. Nindyo Pramono, SH.,MS
Universitas Gadjah Mada, 2007 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

Website Otorita Batam

www.batam.go.id

Website Pemerintah Kota Batam

www.pemko-batam.go.id/